

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam semua aspek kehidupan manusia mengakibatkan perubahan cara berinteraksi dalam masyarakat dan cara masyarakat melibatkan individu dalam sebuah proses evolusi[1]. Demikian juga dalam sebuah pemerintahan dimana hubungan pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan pelaku usaha, antar lembaga pemerintahan dan pemerintah dengan pegawainya mulai mengarah penggunaan TIK. Sejalan dengan perkembangan TIK, pemerintahan berbagai Negara mulai menerapkan TIK dalam melayani masyarakatnya maupun untuk kebutuhan operasionalnya. Muncul istilah *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dipopulerkan oleh *World Bank*[1]. *E-Government* oleh *World Bank* didefinisikan sebagai "sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki atau dioperasikan pemerintah yang mengubah hubungan dengan warga negara, sektor swasta dan / atau lembaga pemerintah lainnya untuk pemberdayaan warga negara, meningkatkan layanan, memperkuat akuntabilitas, meningkatkan transparansi, atau meningkatkan efisiensi pemerintah" [1]. *E-government* populer sebagai label yang telah digunakan untuk menggambarkan aplikasi pemerintah secara luas dari teknologi informasi dan komunikasi yang inovatif, seperti Internet, untuk memberikan layanan, informasi, dan pengetahuan yang efisien dan hemat biaya. Hal ini juga digunakan untuk menggambarkan komitmen dari para pembuat keputusan untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah, warga negara dan sektor publik.

E-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada umumnya mengacu pada penggunaan alat teknologi informasi, seperti *Wide Area Network (WAN)*, Internet, dan penggunaan aplikasi seluler, oleh lembaga pemerintah, yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara, pelaku usaha, dan lembaga pemerintah lainnya. Teknologi ini memiliki berbagai tujuan yang berbeda seperti pemberian layanan pemerintah yang lebih baik kepada warga, peningkatan interaksi dengan pelaku usaha dan industri, dan

pemberdayaan warga negara melalui akses ke informasi, atau pemerintahan yang lebih efisien[1].

Dalam perkembangannya, penerapan SPBE mulai menggunakan Arsitektur Enterprise (AE) untuk menyelaraskan TIK dengan tujuan pemerintahan dengan satu bahasa yang sama. Mulai sejak tahun 1980-an, beberapa kerangka kerja (*FrameWork*) berhasil dikembangkan seperti *Zachman FrameWork*, TOGAF, *NIST-EA Model*, Gartner dan lainnya. Kerangka kerja tersebut didesain untuk membangun AE secara umum. Pada tahun 1999 dikembangkan Kerangka Kerja Arsitektur Enterprise FEAF versi 1 (*Federal Enterprise Architecture Framework version 1*) berdasarkan kebutuhan pemerintah federal Negara Amerika Serikat. *Framework* ini dikembangkan untuk membantu membangun AE dari sebuah Negara, dan pada akhirnya FEAF menjadi acuan kerangka kerja AE untuk sebuah Negara dan digunakan diberbagai Negara seperti Australia, New Zealand dan Negara lainnya, sesuai dengan karakteristik masing-masing Negara. FEAF versi kedua diluncurkan pada tahun 2013 dengan mengadopsi perkembangan TIK lebih lanjut. FEAF sampai saat ini merupakan kerangka kerja Arsitektur Enterprise dikhususkan untuk sebuah Negara[2].

Pemerintah Indonesia mulai menerapkan SPBE berbasis Arsitektur Enterprise dengan lahirnya Keputusan Presiden no 95 tahun 2018 pada bulan Oktober 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam SPBE ini menyiratkan penerapan prinsip-prinsip Arsitektur Enterprise (AE) secara jelas termasuk tata kelolanya. Konsep Model Referensi dan Domain Arsitektur menjadi komponen dari proses pengembangan AE SPBE. Dalam SPBE memiliki domain referensi dan arsitektur yang terdiri dari Bisnis, Data, Layanan, Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan. Dalam SPBE ini juga menyiratkan proses rewiu dan evaluasi terhadap penerapan/implementasi EA[3]. FEAF v2 mengenalkan konsep model referensi dalam AE, dan terdapat model referensi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penerapan AE yang disebut *Performance Reference Model* atau disingkat PRM. PRM ini digunakan sebagai acuan pengukuran tingkat keberhasilan dari implementasi AE dalam setiap domain. Dalam SPBE belum menyiratkan satu referensi untuk pengukuran evaluasi implementasi sebagai pedoman evaluasi. PRM sesuai konsepnya dapat digunakan sebagai pedoman

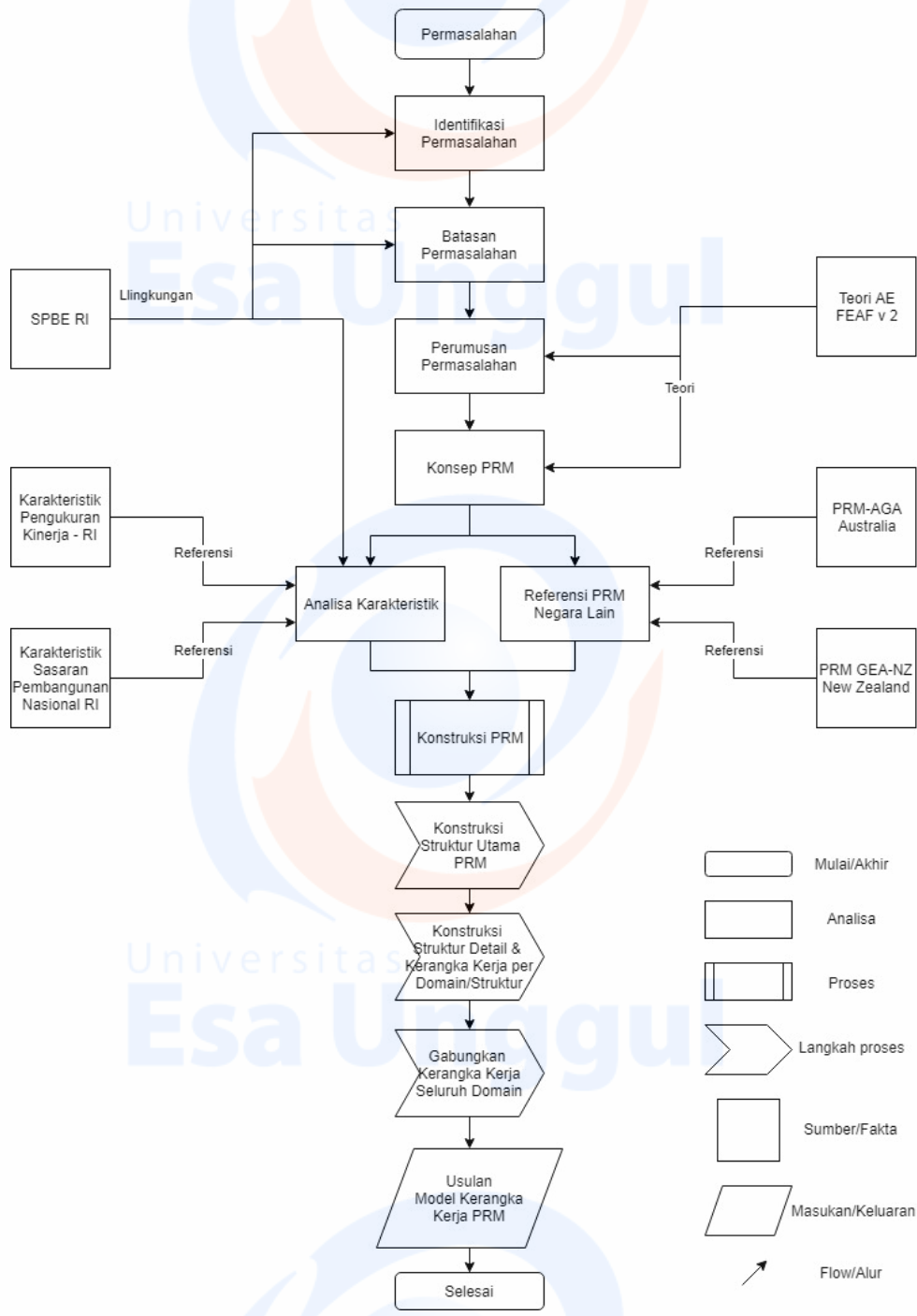
evaluasi. Posisi PRM dalam SPBE dapat digunakan sebagai referensi pengukuran kinerja keberhasilan dalam implementasi Model Referensi ke dalam Domain Arsitektur. Model referensi menjadi acuan dan sekaligus di dalam PRM juga ditetapkan tujuan, strategi dan ukuran yang menjadi tolok ukur dalam keberhasilan penerapan dalam domain arsitektur. Peran PRM adalah memberikan pengukuran terhadap inisiatif/kegiatan /program yang dijalankan dalam menerapkan AE dalam setiap domain berdasarkan referensi arsitektur. Hasil dari pengukuran dapat digunakan sebagai bahan revidi atau evaluasi keberhasilan penerapan AE.

Di beberapa negara yang telah mengimplementasikan AE, PRM menjadi salah satu hal yang penting untuk mengetahui kinerja penerapan AE tersebut yang diterapkan dalam setiap program pemerintah. Secara tidak langsung PRM menghubungkan antara program atau kegiatan dengan tujuan dan AE dari sebuah negara atau Lembaga. Beberapa contoh yang telah menerapkan konsep ini dari FEAF selain Amerika Serikat adalah Australia dan New Zealand.

Dalam Tesis ini diuraikan bagaimana menerapkan konsep PRM dari FEAF v2 untuk membangun model pengukuran keberhasilan (PRM) penerapan AE di SPBE. Karakteristik dari kinerja dan SPBE RI dan referensi contoh penerapan PRM dari Australia dan New Zealand digunakan sebagai referensi pembentukan model PRM. Keluarannya adalah berupa model kerangka kerja model referensi PRM yang sesuai dengan karakteristik SPBE-RI.

1.2 Kerangka Pikir

Penerapan konsep PRM dalam SPBE-RI memerlukan sebuah kerangka pikir untuk menjelaskan hubungan penyelesaian masalah dengan teori, konsep yang dirumuskan berdasarkan tinjauan pustaka yang terkait, dan variable seperti fakta sebagai karakteristik penyelesaian. Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 1.1.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Penjelasan dari kerangka pikir di atas adalah sbb:

a) Identifikasi Permasalahan

Dalam sebuah pemerintahan terdiri dari beberapa lembaga dan atau pemerintah daerah yang mana disyaratkan untuk dapat menerapkan AE yang telah ditetapkan. SPBE RI menyiratkan proses evaluasi terhadap penerapan EA. Dalam prakteknya, penerapan AE di sebuah lingkungan tidak dapat diterapkan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, namun perlu diukur tingkat keberhasilannya, sehingga dapat diketahui permasalahan yang terjadi dan dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan tingkat kesiapan dan karakteristik dari lingkungan tersebut. Secara teoritik dalam kerangka kerja AE diperlukan model pengukuran tingkat keberhasilan penerapan AE. Berdasarkan hal tersebut di atas ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sbb:

Diperlukan model pengukuran keberhasilan penerapan AE dalam SPBE RI

b) Batasan Permasalahan

EA dalam SPBE mencakup dari penerapan AE dengan konsep model referensi dan domain arsitek [3]. Reviu yang tersirat dalam SPBE meliputi reviu terhadap keseluruhan SPBE termasuk didalamnya penerapan tata kelola SPBE. Ruang lingkup permasalahan ini dibatasi untuk penerapan pengukuran kinerja dan keselarasan untuk kegiatan atau program TIK dengan penerapan AE dalam bentuk model kerangka kerja PRM.

c) Rumusan Permasalahan

Dalam merumuskan permasalahan dan model yang digunakan adalah dengan model dan kerangka kerja berdasarkan *Federated Enterprise Achitecture Framework* (FEAF) versi 2. Didalam konsep FEAF dikenal dengan menggunakan *Reference Model* sebagai acuan dasar EA. FEAF mengenalkan konsep *Performance Reference Model* (PRM) sebagai pengukuran keberhasilan implementasi EA. Kerangka Kerja AE FEAF v2 ini telah digunakan berbagai Negara. USA, Australia dan New Zealand sebagai pengguna kerangka kerja AE ini secara penuh, dan Negara lain menggunakan dengan kombinasi dengan AE lain. Dengan pertimbangan penggunaan FEAF, penerapan PRM di Australia dan New Zealand

akan dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Dari konsep PRM dari FEAF tersebut selanjutnya perumusan masalah yang dapat diteliti adalah:

Apakah konsep PRM dari FEAF v2 dapat diterapkan sebagai model pengukuran keberhasilan penerapan AE SPBE dengan menggunakan contoh penerapan PRM di Negara lain (Australia dan New Zealand) dan karakteristik SPBE – RI?

d) Analisa Karakteristik

Setiap negara memiliki karakteristik sendiri, termasuk dalam hal pengukuran kinerja. Analisa karakteristik dilakukan dengan mempelajari karakteristik pengukuran kinerja dari pemerintah Indonesia. Karakteristik akan mempengaruhi dalam menunjang penerapan konsep PRM. Setiap organisasi memiliki tujuan/goal dan pencapaian goal sebagai kinerja dari aktifitas dalam organisasi. Enterprise merupakan kumpulan atas organisasi (unit-unit) atau entitas yang memiliki tujuan-tujuan bersama, terstruktur dan terkoordinasi dalam aktivitasnya, dan terhubung dengan ekosistem lingkungan luar/sekitarnya[4]. Dan kinerja termasuk dalam sebuah tata kelola (governance) dalam sebuah enterprise (dalam hal ini pemerintah). Dengan menggunakan pendekatan “*Enterprise Ontology*”[4] (Jan AP Hoogervorst) sebagai enterprise (pemerintahan) berlandaskan tujuan/goal untuk mengetahui proses pengukuran kinerja.

e) Referensi penerapan PRM

Untuk lebih menggambarkan penerapan PRM, digunakan referensi penggunaan PRM yang telah digunakan di negara lain sesuai dengan konsep FEAF, yaitu Australia dan New Zealand. Referensi ini digunakan sebagai salah satu acuan proses pembentukan model kerangka kerja PRM dengan gambaran yang telah digunakan di negara tersebut.

f) Konstruksi PRM

Metode dan langkah konstruksi dilakukan dalam membentuk PRM berdasarkan konsep PRM, karakteristik dan contoh dari penerapan PRM di negara lain.

Konstruksi ini dilakukan sesuai dengan tahapan yang ada di kerangka kerja PRM FEAF v2.(pointer ke kotak kerangka pikir?)

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui penerapan konsep PRM dari FEAF v2 sebagai referensi pembentuk model PRM, sejak pembentukan hingga hasil berupa model kerangka kerja PRM. Dengan referensi contoh penerapan PRM dinegara lain dan karakteristik kinerja pemerintah RI diharapkan menghasilkan model pengukuran tingkat keberhasilan (PRM) dari implementasi AE dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.4. Kontribusi Penelitian

Beberapa kontribusi positif dari hasil penelitian sbb:

Bagi pengetahuan:

Memberikan gambaran penerapan konsep dan teori PRM dari FEAF dalam penerapan pembentukan model kerangka kerja PRM.

Bagi pemerintah Indonesia:

1. Memberikan masukan sebagai model pengukuran keberhasilan implementasi AE.
2. Memberikan masukan sebagai salah satu alat evaluasi implementasi AE.

Bagi peneliti:

Dengan hasil model kerangka kerja PRM, dapat dijadikan penelitian lebih lanjut untuk penyempurnaannya khususnya dalam pendalaman unit satuan pengukurannya.

1.5 Tata Laksana Penelitian

1.5.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan dengan pelaksanaan dimulai pada bulan April hingga Oktober 2019, bertempat penelitian di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Universitas Esa Unggul, dimana memungkinkan didapatkan data dan informasi sebagai sumber penelitian.

1.5.2. Tata laksana

Pelaksanaan penelitian dapat dilihat dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1. Jadwal pelaksanaan penelitian

No	Keterangan	Bulan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konsep	■							
2	Perencanaan		■						
3	Studi Pustaka			■	■				
4	Pengumpulan Data				■	■			
5	Konstruksi					■	■	■	
6	Analisa Hasil							■	■
7	Laporan		■	■	■	■	■	■	■

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas tulisan ini, maka materi yang disampaikan dalam tulisan Tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, kerangka pikir, identifikasi permasalahan, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan dan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan laporan penelitian ini.

BAB III Pembahasan

Bab ini berisikan pembahasan tentang contoh referensi dan karakteristik. Diuraikan juga metode proses konstruksi dari pembangunan model.

BAB IV Hasil

Bab ini berisikan proses pembentukan hasil, dari struktur utama hingga struktur detailnya. Pada akhir Bab, diuraikan Hasil yang menjadi keluaran.

BAB V Kesimpulan

Bab yang menjelaskan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

Daftar Pustaka.